

Komunikasi Politik dalam Perspektif Islam: Studi Literatur

Nurrahman¹, Hasan Sazali², Retno Sayekti³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: nurrahman3005254004@uinsu.ac.id¹, hasansazali@uinsu.ac.id²,
retnosayekti69@uinsu.ac.id³

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik dalam perspektif Islam melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dari buku-buku dan artikel ilmiah yang relevan yang membahas komunikasi politik. Politik berkaitan dengan kehidupan banyak orang, begitu pula nilai-nilai komunikasi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik seharusnya tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan perhatian atau simpati dari masyarakat, tetapi komunikasi harus disampaikan dengan baik, benar, dan seimbang. Pentingnya komunikasi politik adalah untuk menghidupkan seluruh proses politik agar dapat memperoleh keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Melihat posisinya yang sentral dalam kehidupan politik, studi komunikasi politik telah menjadi salah satu bentuk studi yang serius di dunia akademis, baik dilihat dari perspektif ilmu komunikasi, ilmu politik, maupun dari perspektif ilmu komunikasi Islam. Ketiga perspektif ini akan menjadi topik utama pembahasan dalam artikel ini.

Kata Kunci: *Etika Komunikasi Islam, Ilmu Komunikasi, Komunikasi Islam, Komunikasi Politik.*

Political Communication from an Islamic Perspective: A Literature Study

Abstract

This article aims to analyze political communication from an Islamic perspective through a literature study approach. The research method used is a literature review of relevant books and scholarly articles discussing political communication. Politics is related to the lives of many people, as are the values of Islamic communication. The results of the study indicate that political communication should not only benefit certain groups to gain public attention or sympathy, but must be delivered well, correctly, and balanced. The importance of political communication is to enliven the entire political process so that decisions can be reached that are acceptable to all parties. Given its central position in political life, the study of political communication has become a serious form of study in the academic world, both from the perspectives of communication science, political science, and Islamic communication science. These three perspectives will be the main topics of discussion in this article.

Keywords: *Islamic Communication Ethics, Communication Science, Islamic Communication, Political Communication.*

PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang selalu berkaitan dengan kehidupan manusia di manapun dan kapanpun mereka eksis adalah masalah politik. Hal ini berkaitan dengan sebab bahwa politik menyangkut hajat hidup dan kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Masalah politik adalah masalah yang selalu menyertai manusia karena berkaitan dengan upaya memenuhi segala tuntutan kehidupan manusia, sejak zaman Yunani Kuno yang ditandai dengan banyaknya pembahasan yang berkaitan dengan politik sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles, Plato, dan filosof lainnya, juga dalam dunia Islam sendiri, bahkan hingga zaman modern ini. bahkan dalam pandangan Harun Nasution, persoalan yang pertama kali timbul di dunia Islam menurut sejarah bukanlah persoalan tentang keyakinan tetapi masalah politik yang berkaitan dengan siapa yang menjadi suksesor Nabi Muhammad saw setelah beliau wafat (Nasution, 1985).

Dalam konteks modernitas, politik menjadi salah satu ajang perwujudan kehidupan demokratis dari suatu negara. Sistem politik yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan negara merupakan sebuah perwujudan demokrasi yang ideal. Demokrasi sebagai sebuah sistem telah dijadikan alternatif berbagai tatanan berbagai aktivitas bermasyarakat dan bernegara di banyak negara. Menurut Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya (Rosyada, et al., 2003).

Demokrasi itu sendiri sebagai bagian dari pranata kehidupan masyarakat memang berperan penting bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan keputusan-keputusan politik. Joseph Schmitter berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sementara itu menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah politik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil mereka yang telah terpilih (Rosyada, et al., 2003).

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan publik, dalam sistem demokrasi terdapat beberapa institusi antara lain pemerintah dan institusi politik seperti parlemen sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang sistem keterwakilannya telah diatur secara politik pula. Kehadiran parlemen dengan berbagai bentuknya telah mewarnai kehidupan politik masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, parlemen mewujudkan dalam bentuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten-Kota. Di Amerika Serikat berbentuk Senat dan House of Representative. Di negara-negara Islam di sebut Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdhi. Semua model parlemen di atas pada umumnya hanya memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, budgeting, dan pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, parlemen mengalami suatu dinamika internal antar sesama anggotanya. Karena perbedaan latar belakang basis politik dan ideologis, terkadang parlemen mengalami kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi hal ini bisa dijumpai dengan upaya pendekatan komunikasi antar elemen internal parlemen.

Model komunikasi yang digunakan inilah yang disebut dengan komunikasi politik. Komunikasi politik memang menjadi solusi yang bijak untuk menjembatani perbedaan yang terjadi. Dengan proses ini, maka dinamika akan hidup kembali karena menghidupkan kembali komunikasi yang terputus, sehingga sebuah keputusan bisa dihasilkan.

Uraian di atas menggambarkan tentang pentingnya komunikasi politik untuk menghidupkan keseluruhan proses politik agar memperoleh keputusan yang bisa diterima semua pihak. Melihat posisi sentralnya dalam kehidupan politik, maka kajian komunikasi politik telah menjadi salah satu bentuk kajian yang serius di dunia akademik, baik itu ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi, ilmu politik maupun ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi Islam. Ketiga perspektif inilah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam artikel ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (Assingkily, 2021). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian berfokus pada pemahaman konseptual dan teoretis komunikasi politik dari perspektif komunikasi Islam, bukan pada pengukuran kuantitatif atau pengujian hipotesis empiris. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk memeriksa, meninjau, dan mensintesis berbagai pemikiran akademis yang tidak relevan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang fenomena komunikasi politik dari perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Komunikasi Politik

Definisi komunikasi politik secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekocokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik (Novel, 2000).

Demokrasi yang melegitimasi terdapatnya keragaman (pluralitas) tentu harus dipraktikkan ke ranah politik dan kekuasaan. Untuk itu dibutuhkan alat untuk mengantarkan terjadinya proses tawar dan konsensus di antara komponen sosial politik yang ada. Instrumen tersebut adalah komunikasi politik, yang menurut Dan Nimmo (2001) adalah "aktivitas komunikasi yang bermuatan politik untuk tujuan kebajikan dengan berbagai konsekuensi yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan konflik. Dengan komunikasi berbagai nilai demokrasi tersebut dapat dikemas ke dalam pesan politik yang akan memiliki implikasi positif bagi upaya mewujudkan citacita bersama sebagai warga bangsa yang telah mempercayakan proses kenegaraan dan pemerintahan kepada parpol.

Menjamurnya partai politik menjelang pemilu menunjukkan masyarakat amat sadar mekanisme demokrasi sebagai cara terbaik untuk mewujudkan cita-cita bersama. Namun yang terjadi adalah fenomena membiasnya fungsi dan peran parpol dalam komunikasi dan sosialisasi politik, dimana rakyat sering tidak mengetahui atau amat terlambat dalam mengikuti dinamika kebangsaan dan kebijakan pemerintah yang berimplikasi luas pada

kehidupan rakyat. ranah demokrasi kehidupan politik tentu konsensus itu dicapai melalui komunikasi (politik) yang sarat dengan niat demokrasi serta visi misi elit politik sering tidak diikuti dialektika dengan kalangan akar rumput agar terdapat kesepahaman serta hilangnya kesenjangan yang mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi. Oleh karenanya, etika politik diperlukan secara kontinu dalam proses komunikasi politik di tengah transisi demokrasi saat ini di mana etika politik mengarahkan ke hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam kerangka memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil. Barangkali bisa dipahami dengan komunikasi politik yang beretika maka nilai-nilai demokrasi tetap dikedepankan serta mereka akan menjaga komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik. Bukan sebaliknya, komunikasi politik di era keterbukaan dan kebebasan saat ini hanya dijadikan alat merealisasikan kepentingan individu maupun kelompok dengan terus mengatasnamakan demokrasi, namun sebenarnya telah melakukan distorsi komunikasi yang pada akhirnya hanya memperpanjang penderitaan dan kesulitan hidup rakyat kecil.

Komunikasi politik yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (Subaktio & Ida, 2012).

Model Komunikasi Politik

Model komunikasi politik adalah kerangka kerja atau representasi teoritis yang membantu memahami bagaimana pesan-pesan politik diproduksi, disalurkan, dan diterima oleh publik. Model-model ini menyediakan lensa untuk menganalisis proses komunikasi yang terjadi antara aktor politik (seperti politisi dan partai) dan masyarakat.

Berikut adalah beberapa model komunikasi politik yang paling dikenal:

1. Model Lasswell

Model ini merupakan salah satu model komunikasi klasik yang paling sederhana dan sering dikutip. Dikenal dengan formula lima pertanyaan:

- Siapa? (Who?) Komunikator politik, yaitu individu atau kelompok yang menyampaikan pesan.
- Mengatakan apa? (Says what?) Pesan atau konten politik yang disampaikan.
- Melalui saluran apa? (In which channel?) Media atau saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan (misalnya, pidato, iklan, atau media sosial).
- Kepada siapa? (To whom?) Khalayak atau penerima pesan.
- Dengan efek apa? (With what effect?) Dampak dari pesan tersebut terhadap penerima (Lasswell, 1948).

2. Model Interaksional

Model ini berfokus pada komunikasi politik sebagai sebuah proses interaksi timbal balik antara komunikator (aktor politik) dan khalayak. Tidak seperti model linier (satu arah), model ini menekankan bahwa penerima pesan juga dapat memberikan umpan balik, yang kemudian memengaruhi komunikator. Interaksi ini bisa terjadi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, yang memungkinkan dialog langsung.

3. Model Agenda Setting

Model ini menjelaskan bagaimana media massa memengaruhi persepsi publik tentang isu-isu yang dianggap penting.

- Media, dengan menyoroti isu-isu tertentu, dapat menentukan "agenda" atau topik yang dianggap penting oleh masyarakat.
- Model ini memiliki dua tingkatan:
 - Tingkat pertama: Media memberi tahu publik "apa yang harus dipikirkan" (tentang isu tertentu).
 - Tingkat kedua: Media juga memengaruhi "bagaimana publik memikirkan" isu tersebut dengan cara membingkai atau menyajikan informasi.

4. Model Komunikasi Antarbudaya (Gudykunst dan Kim)

Model ini menganalisis komunikasi politik yang terjadi di antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda, termasuk budaya politik. Model ini relevan dalam memahami dinamika politik global atau komunikasi yang melibatkan masyarakat dengan latar belakang sosiokultural yang beragam.

5. Model Propaganda

Model ini berfokus pada penggunaan komunikasi untuk memengaruhi, memanipulasi, atau mengontrol opini dan perilaku publik demi kepentingan tertentu, sering kali dengan cara yang tidak transparan atau manipulatif. Dalam konteks politik, propaganda dapat digunakan untuk membangun dukungan massa atau mendiskreditkan lawan.

Peran media sosial dalam model komunikasi politik modern di era digital, media sosial telah mengubah banyak model tradisional, memungkinkan komunikasi politik yang lebih langsung dan interaktif.

- Politisi dapat berinteraksi langsung dengan publik, melampaui perantara media tradisional, seperti yang dilakukan oleh Jaime Rodriguez Calderon, "El Bronco," di Meksiko.
- Publik dapat berpartisipasi secara aktif, memberikan umpan balik, dan bahkan memengaruhi pembuatan kebijakan dengan menyuarakan pendapat melalui platform digital.
- Namun, media sosial juga membawa tantangan, seperti penyebaran disinformasi dan hoaks, yang dapat memengaruhi opini publik dan integritas proses politik.

Tujuan Komunikasi Politik

Sebenarnya banyak pendapat para pakar komunikasi yang dapat dikutip yang memaparkan fungsi komunikasi. Namun, kalau disimak, keseluruhan pendapat tersebut kembali kepada hakikat fungsi komunikasi, yakni membangun hubungan vertikal dan horisontal. Kendati jika ditakar lebih banyak pakar yang menitikberatkan komunikasi horisontal saja, yakni mengungkap hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Terdapat tiga unsur pokok proses komunikasi, yakni pemberi pesan, pesan, dan penerima pesan. Dalam model komunikasi klasik dari Aristoteles, ketiga komponen itu ditegaskan dengan istilah speaker, message, dan listener (Suryadi, 1993).

Shannon dan Weaver mengistilahkan ketiga unsur tersebut dengan information source, message, dan receiver. Sementara Schramm menyebutnya encoder, message,

decoder. Kemudian Berlo menyebutnya *source*, *message*, dan *receiver*, serta istilah-istilah lainnya yang disodorkan oleh para ilmuwan komunikasi. Walaupun terdapat berbagai istilah yang digunakan, ketiga unsur tersebut menjadi sentral utama terjadinya proses komunikasi yang ditandai dengan interaksi simbolik antar pihak yang terlibat di dalamnya (Quail, 1994).

Hal yang sama juga terjadi dalam komunikasi politik. Walaupun kebanyakan peneliti komunikasi politik menggunakan model Lasswell, tetap saja inti model tersebut terpusat dari ketiga unsur tersebut, walaupun dalam gambaran modelnya Lasswell tidak menyebutkan secara eksplisit istilah komunikator, pesan dan komunikan. Lasswell mengungkapkan model komunikasinya secara verbal dengan lima pertanyaan: *who* (siapa sumbernya), *says what* (apa yang disampaikan), *in which channel* (melalui media apa), *to whom* (siapa sasaran), *with what effect* (apa pengaruhnya).

Komunikasi politik tidak bisa dilepaskan dari pandangan teori interaksi simbolik. Sebab dalam prosesnya pertukaran pesan dilakukan melalui berbagai atribut atau simbol-simbol dari masing-masing partai politik maupun aktor politik. Misalnya, pada saat kampanye simbol-simbol, bendera partai banyak menggunakan gambar/foto dari para aktor politik. Penggunaan simbol-simbol tersebut menurut Eep Saefullah Fattah adalah ingin terlihat menonjol. Di mana penonjolan semacam ini ternyata sangat bersifat simbolik sehingga teori interaksi simbolik sebagai pendekatan yang bermanfaat untuk menggali berbagai pengertian tentang kehidupan kelompok manusia dengan fokus sentralnya tentang interaksi dan komunikasi politik yang dilakukan untuk mempertukarkan pesan-pesan politik dalam pemilihan calon-calon politik tertentu (Fatah, 2000).

Teori interaksi simbolik pada dasarnya berada di bawah payung perspektif yang lebih besar, yaitu perspektif fenomenologis, di mana tokoh utamanya adalah George Herbert Mead. Dia mengungkapkan bahwa keseluruhan sosial mendahului pemikiran individu baik secara logika maupun secara temporer. Individu yang berpikir dan sadar diri adalah mustahil secara logika tanpa di dahului adanya kelompok sosial. Menurut Mead kelompok sosial muncul lebih dulu, dan kelompok sosial menghasilkan perkembangan keadaan mental kesadaran diri (Ritzer, 2007).

Esensi dasar dari teori Mead adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Blumer mengintegrasikan gagasan-gagasan interaksi simbolik dengan John Dewey, William I. Thomas dan Charles H. Cooley. Gagasan mereka tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Hal ini didasarkan pada tiga asumsi, yaitu:

Pertama, individu merespons suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka tidak bersifat mekanistik, tidak pula bergantung bagaimana eksternal; alih-alih, respons mereka bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi sosial. Jadi, individu adalah yang dipandang aktif menentukan lingkungan mereka sendiri.

Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau

peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak. Akan tetapi, nama atau simbol yang digunakan untuk menandai objek, tindakan, peristiwa, dan gagasan itu bersifat arbitrer (sembarang). Artinya, logis antara nama atau simbol dengan objek yang dirujuknya meskipun kita terkadang sulit untuk memisahkan kedua hal itu. Melalui penggunaan simbol itulah manusia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia.

Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya. Manusia membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Dalam proses ini, individu mengantisipasi reaksi orang lain, mencari alternatif-alternatif ucapan atau tindakan yang akan ia lakukan. Individu membayangkan bagaimana orang lain akan merespons ucapan atau tindakan mereka. Proses pengambilan-peran tertutup (*covert role-taking*) itu penting, meskipun hal itu tidak teramati. Karena itu, kaum interaksionis simbolik mengakui adanya tindakan tertutup dan tindakan terbuka, menganggap tindakan terbuka sebagai kelanjutan dari Tindakan tertutup (Mulyana, 2002).

Ketiga asumsi tersebut di atas, disimpulkan Blumer dalam tiga premis, yaitu: (a) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu, (b) makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, dan (c) makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Seperti yang ditegaskan Blumer, maka perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek (Kuswarno, 2009).

Perspektif interaksi simbolik menurut Besker menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Defenisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri sendiri ditentukan oleh perilaku mereka sendiri. Karena itu menurut Johannes manusia bertindak hanya berdasarkan defenisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling mereka, dan tidak digolongkan sebagai kebutuhan dan dorongan impuls (*hati*), tuntutan budaya, atau tuntutan peran. Bagi Blumer proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegakkan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menegakan kehidupan kelompok. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi, dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan peranannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial (Mulyana, 2002).

Berkaitan dengan teori interaksi simbolik ini, maka Ritzer meringkas teori ini ke dalam prinsip-prinsip, sebagai berikut: (1) Manusia, tidak seperti hewan lebih rendah, diberkahi dengan kemampuan berpikir. (2) Kemampuan berpikir itu dibentuk oleh interaksi sosial. (3) Dalam interaksi sosial orang belajar makna dan simbol yang memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berpikir. (4) Makna dan simbol memungkinkan orang melanjutkan tindakan (*action*) dan interaksi yang khas manusia. (5) Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas situasi. (6) Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini karena, antara lain kemampuan mereka berinteraksi dengan diri sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan-

tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya. (6) Pola-pola tindakan dan interaksi yang jalin-menjalin ini membentuk kelompok dan masyarakat (Mulyana, 2002).

Berdasarkan ketiga premis dan ringkasan teori di atas, menurut Engkus Kuswarno terdapat esensi bahwa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna merupakan suatu aktivitas yang khas di antara manusia. Selain itu seseorang akan menjadi manusiawi hanya melalui interaksi dengan sesamanya, di mana interaksi yang terjadi antara manusia membentuk masyarakat. Karena manusia secara aktif membentuk perilakunya sendiri. Kesadaran dan pikiran melibatkan interaksi manusia dengan dirinya sendiri.

Berkaitan dengan kemampuan manusia untuk dapat merespon simbol-simbol di antara mereka berinteraksi, menurut Mead membawa penjelasan interaksi simbolik kepada konsep tentang diri (self). Apa yang menjadi penekanan dalam teori ini sangat relevan dengan penelitian ini. Karena konsep Mead tentang diri yang lebih menekankan pada konsep “pengambilan peran orang lain” (taking the role of the other), atau penjabaran “diri sosial” (social self) adalah dilakukan melalui makna yang dikonstruksikan secara sosial (Mulyana, 2002).

Dengan demikian, maka konsep diri sebagai suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain dapat diterapkan dalam proses komunikasi politik antaraktor politik, atau di luar aktor politik. Di samping konsep diri ini, juga interaksi sosial individu melalui makna maupun simbol-simbol komunikasi baik simbol verbal maupun non-verbal.

Tujuan utama komunikasi politik adalah memengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Secara umum, komunikasi politik berperan sebagai penghubung antara pemangku kepentingan politik dan publik, serta untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih spesifik.

Tujuan umum komunikasi politik (a) *Sosialisasi politik*: Membentuk sikap, nilai, dan pemahaman politik pada masyarakat, terutama generasi muda. (b) *Rekrutmen politik*: Merekrut individu yang memiliki orientasi dan nilai politik yang sama untuk menjadi bagian dari sebuah organisasi politik. (c) *Artikulasi kepentingan*: Menyuarakan berbagai aspirasi dan pendapat dari masyarakat. (d) *Agregasi kepentingan*: Menggabungkan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dirumuskan menjadi kebijakan publik. (e) *Membentuk opini publik*: Memengaruhi persepsi dan pendapat masyarakat terhadap suatu isu politik, kandidat, atau partai. (f) *Membangun citra*: Memperlihatkan citra diri yang baik dari komunikator politik kepada masyarakat. (g) *Mempengaruhi pembuatan keputusan*: Memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Komunikasi Politik dalam Islam

Komunikasi Politik dalam Perfektif Al-Qur'an

Dalam perkembangan politik Islam sejak masa Nabi hingga saat ini, kita dapati perbedaan gaya politik dan komunikasi politik, baik di bawah kekuasaan empat khalifah hingga saat ini, yang kita kenal saat ini, melainkan semuanya. tidak lepasnya Al-Qur'an sebagai panduan pengakuan serta aturan dan diapresiasi dari para penggerak negara-negara Islam.

Surah dan Ayat Al-Qur'an yang selalu ditunjuk adalah QS. An-Nisa. 4: 58-59 yang tergolong surat madaniyyah, Artinya:

58. *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*
59. *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Banyak ulama menganggap kedua ayat yang diterangkan di atas dijadikan ketentuan pertama dari menyatukan petunjuk Islam dengan otoritas dari arti kewajiban terhadap keimanan seseorang dan kewenangan Allah SWT. Semua ini menunjukkan bahwasannya Allah SWT sudah mengatur semua aspek aktivitas manusia melalui ketentuan yang dituliskan dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan keadaan syumuliatul Islam. Amanat dijelaskan tentang segala hal, salah satunya diartikan pemilik watak yang adil. Kesaarataan yang dibutuhkan tidak lebih untuk golongan, kumpulan umat Islam saja, akan halnya untuk semua orang malahan untuk semua makhluk (Shihab, 2000).

Salah satu kewenangan Ibnu Abbas. Ceritanya, sesudah fathu atau kebebasan negara Makkah, Rasulullah menyebut Utsman bin Talhah dimintamemberikan kunci Ka'bah. Selagi Utsman mendatangi Nabi dalam memberikan kunci, Abbas berdiri dan mengatakan: "Wahai Rasulullah, demi Allah, berikan aku kunci itu agar aku bisa melipatgandakan posisi siqayah (menyiram). Utsman mundur. Kemudian Nabi berkata: "Berikan aku kuncinya, hai Utsman!" Utsman berkata: "Ini dia, perintah Allah." Kemudian Rasulullah bangkit, mengekspos Ka'bah dan keluar untuk mengelilingi rumah. Jibril memerintahkan agar kunci tersebut dikembalikan kepada Utsman. Rasulullah memenuhi amanat tersebut dengan melafalkan QS An-Nisa:58 (Shaleh, et al., 1982).

Bukhari dan sahabat lainnya menceritakan tentang ibn Abbas, yang memiliki sejarah singkat. Menurut Imam Ad-Dawud, silsilah itu menggunakan nama Ibnu Abbas secara keliru dikarenakan Riwayat Abdullah bin Hudzafah ialah sebagai berikut: Ketika Abdullah emosi terhadap tentaranya, dia menunjuk api dan mengintruksikan tentaranya untuk terjun ke dalamnya. Kemudian beberapa dari mereka hamper menceburkan tubuh kedalam api. Jika ayat ini diturunkan dari awal peristiwa Abdullah, sebab ayat ini diprioritaskan hanya untuk menuruti Abdullah bin Hudzafah, sedangkan di waktu yang berbeda tidak. Dan jika ayat ini datang setelah itu, berlandaskan hadits-hadits yang telah mereka ketahui, maka nan harus diikuti adalah ma'rufis (kebaikan) dan tidak selayaknya diberitahukan mengapa mereka membangkang.

Imam Al-Qurthubiy Tafsir Al-Jami' li Ahkamil mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa seorang kepala negara harus menunaikan amanah nan diberikan kepada orang tersebut, jangan melaksanakan kesewenang-wenangan, bijaksana dalam pelaksanaan ketentuan dan cerdas dalam kepemimpinan. dari dana kenegaraan. Al-Qurthubiy lanjutnya mengatakan bahwa pemenuhan wewenang ialah poin penting dari segala peraturan yang harus dilaksanakan. Artinya sungguh fundamentalnya perspektif yang harus dipunyai oleh seorang kepala negara (Al-Qurthubiy, 2006).

Adapun dunia, selain itu Dia memberikan sebagian kekuasaan-Nya kepada makhluk hidup. Dalam konteks kekuasaan politik, Alquran memerintahkan Nabi Muhammad SAW.

Untuk membuat pernyataan tegas QS. Al Imran. 3. 26: *'Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Sebagaimana dinyatakan didalam ayat di atas, Allah SWT memberikan pada manusia dari bagian kekuatan. Dari sela-sela diantaranya ada yang menang menunaikan kewajiban dengan sempurna, dikarenakan mereka mengikuti pilar kebijakan. Menurut pemahaman Islam, manusia memiliki Amanat. Amanat bisa dijadikan sebagai hasil pemberitahuan menyeleruh yang dibuat makhluk hidup di hadapan TuhanNya, berbarengan sanggahan terhadap fitrah etis makhluk sosial, yang harus diyakinkan dengan keberuntungan memenuhi amanat yang mampu ia penuhi.

Amanat risalah mengacu pada status rakyat khalifatullah fi Al-Ardhina. Kedudukan ini meliputi kegiatan makhluk sosial dalam memperkaya dan melestarikan bumi, mengatur kehidupan dan memperkaya umat. Kegiatan ini jelas merupakan kegiatan dan tugas politik manusia. Dengan demikian, arti luas tantang amanah risalah ialah memperjelaskan manusia merupakan makhluk siyasah dengan bertanggung jawab memelihara tatanan kehidupan di tengah-tengah manusia dilingkungan kehidupnya, berbeda dari siyasah untuk kemakmuran dunia didalam Islam merupakan keinginan serta jalan dan alternatif menuju keinginan yang lebih mulia dan abadi, yaitu selamat dari hidup yang lebih berarti sehingga mendapatkan keabadian di akhirat (Ridha, 2004).

Kedaulatan mengarah pada pemerintah politik bersama dengan prosedur tercantum dalam QS. Shaad. 38.26: tergolong dalam surat makkiyah: *'Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

Etika Komunikasi Politik dalam Alquran

Etika komunikasi dibangun berdasarkan petunjuk Alquran, Islam mengajarkan bahwa berkomunikasi itu harus dilakukan secara beradab, penuh penghormatan, penghargaan terhadap orang yang diajak bicara, dan sebagainya. Ketika berbicara dengan orang lain, Islam memberikan landasan yang jelas tentang tata cara berbicara. Tata cara berbicara kepada orang lain itu misalnya harus membicarakan halhal yang baik, menghindari kebatilan, perdebatan, pembicaraan dan permasalahan yang rumit, menyesuaikan diri dengan lawan bicara, jangan memuji diri sendiri, dan jangan memuji orang lain dalam kebohongan.

Etika komunikasi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari nilai-nilai Ilahiyah. Semua prinsip itu dijadikan sebagai fondasi dasar dalam berpikir, bersikap, berbicara, bertindak dan sebagainya dalam kehidupan umat Islam tanpa kecuali. Karena, pada prinsipnya dengan siapapun umat Islam berkomunikasi, mereka harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mendasari etika komunikasi dalam kehidupan di masyarakat, terutama dalam keluarga.

Ada beberapa cara menutupi kebenaran dengan komunikasi, yakni (a) menutupi kebenaran dengan menggunakan kata-kata yang abstrak, ambigu atau menimbulkan

penafsiran yang sangat berlainan apabila anda tidak setuju dengan pandangan kawan anda, kemudian anda segera menyebut dia “tidak pancasilais”. Anda sebetulnya tidak tahan dikritik, tetapi tidak enak menyebutkannya lalu anda akan berkata, “saya sangat menghargai kritik, tetapi kritik itu harus disampaikan secara bebas dan bertanggung jawab”. Kata “bebas” dan “bertanggung jawab” adalah kata abstrak untuk menghindari kritikan. Ketika seorang mubalig menemukan pendapat Muballig lain dan pendapatnya tidak logis, iya akan berkata, “akal harus tunduk dengan agama”.

Dia sebetulnya mau mengatakan bahwa logika orang lain itu harus tunduk dengan pemahamannya tentang agama. Akal dan agama adalah dua kata abstrak. Oleh karena itu, menasehatkan agar kita berhati-hati menggunakan abstrak. (b) orang menutupi kebenaran dengan menciptakan istilah yang diberi makna orang lain. Istilah itu berupa eufimisme atau pemutar balikan makna sama sekali. Pejabat melaporkan kelaparan di daerahnya dengan mengatakan “kasus kekurangan gizi atau “rawan pangan”. Ia tidak dikatakan “ditangkap”, tetapi “diamankan”. Harga tidak dinaikkan, tetapi “disesuaikan” (Abdurrahman, 2001).

Etika komunikasi politik adalah keseimbangan dari proses penyampaian pesan dari komunikator politik kepada khayalak (komunikan politik) melalui saluran yang seimbang dan berkeadilan (tidak manipulatif), tidak ada tendensi atau kepentingan individu atau golongan tertentu. Selanjutnya simpulan diatas akan diperkuat dengan Wahyu Ilahi yang meminta hamba-Nya (manusia) untuk berulang-ulang memperhatikan, mengamati apakah ada yang tidak seimbang dengan penglihatan kita baik mata kepala maupun mata hati (qalbu). Sampai dapat dipastikan tidak ada cacat sedikitpun (dikoreksi, dievaluasi, dan diperbaiki selalu). Apa yang dilakukan oleh manusia hanyalah berupaya untuk menuju sempurna walaupun mungkin itu adalah suatu yang sangat mustahil. Karena kesempurnaan hanyalah milik Sang Khaliq Maha Pencipta.

Etika mengharuskan aktor, pelaku atau sang komunikator untuk memastikan kondisi yang stabil, seimbang dan adil mulai dari niat, ucapan dan perbuatan. Jangan kita serba berlebih-lebihan dan kekurangan dalam segala hal dalam kehidupan ini. Orang yang diberi karunia dengan kerupawanan, kesuksesan, kemakmuran, kaya harta jangan menjadikan kesombongan, dan yang serba kekurangan, miskin, tidak rupawan dan lainnya janganlah menjadi pesimis.

Etika komunisi dalam politik merupakan tata nilai dalam berkomunikasi pada peristiwa politik. Masalah politik adalah aktivitas pada hierarki tertinggi dalam kehidupan sosial. Maka kajian ini akan fokus kepada komunikator politik, pesan politik dan saluran politik. Komunikator politik sebagai pelaku utama atau yang mengawali pembentukan pesan sampai dengan menggunakan saluran tertentu yang ditujukan kepada penerima pesan politik (khalayak politik).

Masalah politik tidak saja terjadi secara linear (satu arah), atau interaksional sebatas adanya aksi-reaksi berupa umpan balik (feedback) saja, tapi terjadi suatu yang terus-menerus (transaksional). Secara transaksional terwujud dengan adanya “pembicaraan yang krusial”.

Diawali dari tahapan pertama, yaitu pembicaraan ringan berupa konsultasi dan kordinasi minimal diantara dua atau lebih komunikator politik, suasana ini dikarenakan diantara mereka masih sama dalam hal pandangan dan kepentingan. Tahap kedua, yaitu pembicaraan sedang dalam bentuk diskusi, negosiasi atau lobi-lobi politik antara dua orang atau lebih kompromi untuk menentukan solusi secara teknis, karena tahap ini terjadi

perbedaan pandangan namun masih satu kepentingan. Tahap ketiga, yaitu pembicaraan krusial dimana terjadi perbedaan pandangan dan perbedaan kepentingan. Percakapan krusial merupakan sebuah diskusi antara dua orang atau lebih ketika (1) Taruhan tinggi, (2) pendapat berbeda, dan (3) Emosi tinggi (Patterson, et al., 2005).

Pada ilmu komunikasi khususnya yang menyangkut dengan komunikasi yang etis meliputi beberapa aspek misalnya menerapkan etika kejujuran atau objektivitas berdasarkan fakta, senantiasa berlaku adil atau tidak memihak dengan menyampaikan berita secara berimbang serta menerapkan etika kepatutan dan kewajaran.

Hal ini menunjukkan adanya karakteristik etika berkomunikasi yang lebih difokuskan pada kajian ayat-ayat AlQur'an tentang etika komunikasi. Adapun karakteristik etika komunikasi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kejujuran Komunikasi

Al-Qur'an menyuruh kita untuk selalu berkata benar. Kejujuran melahirkan kekuatan, sementara kebohongan mendatangkan kelemahan. Biasa berkata benar mencerminkan keberanian. Bohong sering lahir karena rendah diri, pengecut, dan ketakutan. Orang "yang membuat-buat kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pendusta".

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nahl ayat 105: Artinya: *Sesungguhnya yang mengada-adakan jual beli, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu pembohong.*

Menurut Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H, *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah,*" maksudnya aksi kebohongan semata-mata muncul dari "orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah," semisal para penentang Rasulullah, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata "dan mereka itulah orang-orang pendusta," maksudnya praktik kedustaan sudah terpola pada mereka. Predikat ini lebih pantas dilontarkan kepada mereka daripada orang lain.

2. Adil dan tidak memihak

Kata adil juga dikategorikan sebagai lawan kata dari kata zulm. Siapa yang tidak berlaku adil maka ia dinilai bersifat zalim. Di dalam Al-Qur'an kata al-adl dengan segala perubahan bentuknya diulang sebanyak 28 kali.

Antaranya terdapat pada surat Al-An'am ayat 152, Artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah swt. yang demikian itu diperintahkan Allah swt. kepadamu agar kamu ingat.*

Dalam ayat tersebut, yang menjadi topik inti adalah soal berkata-kata dengan adil. Lebih tegas lagi bahwa umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi dengan adil. Artinya harus berkomunikasi dengan benar, tidak memihak, berimbang, sesuai dengan apa yang menjadi hak seseorang. Dalam tafsir memang tidak diperintahkan untuk berbicara secara adil yang bersifat umum, namun lebih berorientasi kepada pemberian kesaksian di pengadilan, akan tetapi dapat dianalogikan kepada semua bentuk komunikasi baik lisan maupun tulisan.

Al-Maragi mengatakan bahwa, keadilan dapat memperbaiki kondisi umat dan perorangan. Keadilan merupakan salah satu sendi dalam pembangunan dan sebagai asas utama dalam urusan sosial. Karena itu tidak boleh bagi seorang mukmin untuk membedakan seseorang, meskipun ia famili atau kerabat dekat.

3. kewajaran dan kepatutan

Komunikator wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyampaikan berita/informasi yang dalam bentuk tulisan dan gambar engan tolok ukur yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara dan bangsa. Misalnya membocorkan rahasia militer sebagai salah satu kekuatan negara atau membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang dapat menyinggung perasaan umat beragama, suku, ras dan golongan tertentu. Dilarang juga menyampaikan berita yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan.

Antaranya terdapat pada surat An-Nisa ayat 9, artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Dalam Al-Qur'an ditemukan tuntunan yang baik dalam etika komunikasi beberapa istilah tersebut adalah *qawlan ma'rufan*, *qawlan sadidan*, *qawlan baligan*, *qawlan kariman*, *qawlan maysuran* dan *qawlan layyinan*. Bertitik tolak dari penelusuran ayat-ayat tentang etika komunikasi yang terdapat di dalam Al-Qur'an berdasarkan kronologis turunnya dengan menemukan beberapa istilah tentang etika komunikasi maka dapat dipertegas tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika komunikasi tersebut

4. Keakuratan informasi

Keakuratan data merupakan salah satu pokok etika komunikasi. Keakuratan informasi dalam komunikasi bila dilihat dari sejauh mana informasi tersebut telah diteliti dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi tentu bisa diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi yang disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang seksama. Ajaran Islam mengakomodasikan etika akurasi informasi tersebut melalui beberapa ayat dalam al-quran.

Salah satunya dalam surat Al-hujarat ayat 6, artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

Ayat tersebut turun untuk mengingatkan kepada Nabi saw. supaya berhati-hati menerima informasi dari seseorang sebelum mengambil keputusan, karena akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut sangat patal. Seandainya Nabisaw. hanya percaya pada informasi al-Walid yang sumbernya tidak jelas boleh jadi Nabi saw. akan menghukum al-Haris} dan kaumnya akibat ketidakjelasan informasi yang diterima tentang keenggannya membayar zakat. Karena tidak tahu apa faktor penyebabnya, tentu tindakan Nabi saw. akan menimbulkan penyesalan.

SIMPULAN

Komunikasi politik dalam perspektif ilmu komunikasi dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek komunikasi mekanistik yang bertumpu pada teori Lasswell yakni komunikator menyampaikan pesan kepada khalayak tertentu melalui suatu media dengan efek tertentu. Dalam konteks politik, komunikator, pesan, dan efek, semuanya bertendensi politik. Aspek yang kedua adalah interaksi simbolik yang bersandar pada teori George Herbert Mead. Berdasarkan pandangan ini maka setiap politisi atau kelompok politik akan mengedepankan suatu atribut khas sebagai simbol identitas dirinya dalam sebuah proses komunikasi positif.

Komunikasi politik dalam perspektif ilmu politik adalah wahana yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan politik yang tujuan akhirnya adalah pencapaian kekuasaan dalam berbagai dimensinya. Dari perspektif ilmu politik, komunikasi politik bisa diperankan oleh politisi yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan tertentu, atau bisa juga diperankan oleh profesional di mana dia dengan keahliannya menghubungkan kepentingan politik dengan khalayak sasarannya.

Komunikasi politik dalam perspektif komunikasi Islam menekankan pada praktek komunikasi politik yang beretika. Model komunikasi ini dibangun berdasarkan teori Hefni yang menyatakan bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip Islam yang memiliki ruh kedamaian, keramahan dan keselamatan. Dengan landasan ini, maka model komunikasi politik yang terbangun adalah komunikasi politik yang beretika yang jauh dari praktek komunikasi politik yang saling serang dan saling menjatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2001). Dasar - dasar *Public Relation*. Bandung: Alumni.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin AbiBakr Al-Qurthubiy, Al-Jami'li Ahkamil Qur'an, (Beirut: Ar-Risalah, 2006), jilid 6.
- Abu Ridha, Manusia dan Kekhalifahan, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004)
- Ali, Novel. (2000). Peradaban Komunikasi Politik, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Balagh, Al. (2023) Komunikasi Politik Perspektif Islam. Jurnal Komunikasi Islam 7 (1) E-ISSN: 2580-4359 (Online)
- Dam Nimmo, (2001) Urgensi Komunikasi dalam Sistem Perpolitikan, Bandung: Alumni
- Farabi.(2019) Komunikasi Politik ditinjau dari perspekti Ilmu Komunikasi, Ilmu politik dan Komunikasi Islam. Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah 16 (1) ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264
- Fatah, Eep Saefullah, Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000)
- Gorden, William J., Communication: Personal and Public (Sherman Oaks California: Alfred, 1989)
- Harold Lasswell, The Structure and Function of Communication in Society, dalam The Communication of Ideas ed. Harper and Row (New York: Lyman Bryson, 1948)
- Henry Subaktio and Rachmah Ida,(2012). Komunikasi politik, media, dan demokrasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Jaya, A. (2023) Etika Komunikasi Politik Dalam Pandangan Al Quran. Jurnal Multi Disiplin 1 (4) 649-659 E-ISSN: 2964-760
- Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, dan Al Switzler, *Crucial Conversations* (2005). Strategi Menghadapi Percakapan Berisiko Tinggi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- K.H.Qamaruddin Shaleh, dkk. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV Diponegoro, 1982)
- Kuswarno, Engkus, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009)
- Mc Quail, Denis, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga; 1994)
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Bandung: Remaja. Rosdakarya, 2002)
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985)
- Quraish Shihab, M.A. *Wawasan Al-Quran: "Tafsir Maudhu" atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung
- Rosyada, Dede, et.al., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003)
- Suryadi, Syamsu, *Elit Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia*, dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1993).